

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR DAN PROPOSISI

2.1 Kajian Pustaka

Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi ilmiah berupa teori, metode, serta pendekatan yang berkembang yang dapat membantu peneliti dalam membatasi bidang kajian untuk menempatkan masalah sesuai perspektif.

Adapun materi yang akan dikemukakan untuk memecahkan masalah yaitu kajian mengenai Administrasi Publik. Pelaksanaan *Good Governance* Dalam Pengembangan Aparatur Sipil Negara Di Kecamatan Talegong Kabupaten Garut serta penelitian terdahulu yang akan digunakan sebagai acuan dasar teori untuk mengembangkan kerangka pemikiran dan proposisi.

2.1.1 Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya ini merupakan kolaborasi hasil peneliti terdahulu dengan masalah penelitian sehingga ini dapat memberikan gambaran pengetahuan yang mendasari penelitian sarjana administrasi publik dan sebagai penguat referensi dari penelitian ini. Penelitian terdahulu bertujuan sebagai rujukan dalam penelitian terkait dengan fokus yang akan diteliti guna mendukung kegiatan penelitian selanjutnya.

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan			
		Teori yang Digunakan	Pendekatan	Metode	Teknik Analisis Data
Safrijal (2016)	Pelaksanaan Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> Oleh Aparatur Pelayanan Publik di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan	Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	Kualitatif	Deskriptif	Wawancara Observasi Dokumentasi
Muhammad Amirul Haq Muis (2014)	Analisis Implementasi <i>Good Governance</i> dalam Pelayanan Publik di Kecamatan	Teori <i>Good Governance</i>	Kualitatif	Deskriptif	Wawancara Observasi Dokumentasi

	Panakkukungan Kota Makassar				
Shinta Tomuka (2013)	Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Girian Kota Bitung	Prinsip-prinsip Good Governance	Kualitatif	Deskriptif	Wawancara Observasi Dokumentasi

2.1.2 Kajian Terhadap Grand Theory

2.1.2.1 Kajian Administrasi

Administrasi adalah segala usaha atau kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan bidang kebijaksanaan untuk mencapai suatu tujuan. Keberadaan administrasi senantiasa dikembangkan oleh pola pemikiran yang dapat dijadikan pedoman untuk melaksanakan berbagai segala aktivitas dan kegiatan manusia yang secara sengaja dilakukan agar tidak terjadi suatu kegagalan dalam pelaksanaan berbagai tindakan yang telah direncanakan sebelumnya.

Administrasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua pengertian, yaitu pengertian dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, pengertian administrasi menurut **Ismail Nawawi** adalah mencatat setiap

komponen administrasi yang menjadi komponen manajemen, organisasi, ataupun kegiatan operasional (Nawawi, 2009; 33). Adapun pengertian administrasi secara luas menurut **Sondang P.** Siagian adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Ayub, 2007; 30).

Berdasarkan pengertian diatas dapat diartikan bahwa administrasi dalam arti sempit adalah segala kegiatan atau aktivitas dalam pengolahan data dan informasi yang meliputi kegiatan atau aktivitas catat-mencatat, surat-menyurat, serta pembukuan secara tertulis yang diperlukan didalam sebuah organisasi atau instansi pemerintahan. Sedangkan pengertian administrasi secara luas berdasarkan pendapat ahli diatas adalah mengenai kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama.

Ulbert Sillalahi dalam bukunya yaitu **Studi tentang ilmu administrasi (2016: 5)** administrasi dalam arti sempit yaitu: “Administrasi adalah penyusunan dan pencatatan data dan informasi secara sistematis dengan maksud untuk menyediakan keterangan serta memudahkan memperolehnya kembali secara keseluruhan dan dalam hubungannya satu sama lain”.

Berdasarkan pendapat ahli diatas mengenai pengertian administrasi secara luas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa administrasi merupakan suatu kerja sama yang dilakukan oleh manusia atau sekelompok atau lebih

dalam melaksanakan perencanaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan sudah dibuat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sebagai suatu metode, administrasi berlangsung didalam organisasi formal, yaitu suatu unit sosial yang dibentuk dengan tujuan mencakup unsur-unsur konflik dan unsur-unsur perubahan. Organisasi dengan struktur formalnya, kelompok sosial, lingkungan sosial, sumber-sumber dan tujuan-tujuan merupakan bahan dasar seorang administrator bekerja. Tugas seorang administrator adalah melaksanakan suatu pekerjaan melalui proses pengorganisasian sumber-sumber dalam mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut **The Liang Gie Harbani Pasolong (2017)** mendefinisikan administrasi, “administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu”.

Menurut **Siagian (2017)** mendefinisikan administrasi, “administrasi sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”.

Dari beberapa definisi diatas, maka dapat menyimpulkan bahwa administrasi sebagai pekerjaan terencana yang dilakukan sekelompok orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan atas dasar efektif, efisien, dan rasional.

Selain itu untuk lebih memahami apa itu administrasi, menurut **White** yang dikutip **Maksudi dalam Dasar-dasar Administrasi Publik**

(2017: 27), “Adminisrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat disetiap usaha kelompok, baik pemerintah maupun swasta, baik sipil maupun militer, usaha besar maupun kecil”.

Berdasarkan definisi diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa administrasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih demi tercapainya tujuan bersama yang telah ditentukan sebelumnya secara efektif dan efisien. Teori adminisitrasi yang masih sesuai dengan tuntutan manusia tersebut inilah dikategorikan sebagai teori actual, terutama yang berkaitan dengan struktur hubungan, legalitas kekuasaan, kesepakatan tujuan, peran yang dimainkan, tanggung jawab kegiatan, jaringan komunikasi dan faktor-faktor lain dalam melaksanakan kerja sama.

2.1.2.2 Teori Administrasi Publik

Administrasi Publik secara etimologi berasal dari bahasa Latin (Yunani) yang terdiri atas dua kata “ad” dan “Ministrate” yang berarti “to serve” yang dalam Bahasa Indonesia berarti melayani atau memenuhi. Sedangkan pendapat **A. Dunsire** yang dikutip ulang oleh **Keban (2008:2)** yaitu :

"Administrasi diartikan sebagai arahan, pemerintahan, kegiatan implementasi, kegiatan pengarahan, penciptaan prinsip-prinsip implementasi kebijakan publik, kegiatan melakukan analisis, menyeimbangkan dan mempresentasikan keputusan, pertimbangan-pertimbangan kebijakan, sebagai pekerjaan individual dan kelompok dalam menghasilkan barang dan jasa publik, dan sebagai arena bidang kerja akademik dan teoritik.”

Pada dasarnya teori administrasi publik merupakan segala aktivitas suatu organisasi atau instansi pemerintahan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari di kehidupan masyarakat, baik didalam ruang lingkup daerah maupun nasional. Administrasi publik pada intinya melaksanakan pembangunan, mengurus, dan memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat. Administrasi berada di sebuah negara merupakan sebuah kemutlakan dan keharusan yang merupakan suatu perangkat pengaturan dan keteraturan yang dapat merupakan suatu pelayanan untuk melayani masyarakat umum. Namun akan tetapi berbalik pada pelayanan terhadap negara. Meskipun negara sebenarnya diadakan untuk kepentingan orang banyak dan memang publik pun dapat diartikan sebagai negara disatu sisi kepentingan masyarakat umum dilayani pemerintah.

Administrasi publik, menurut **Chandler dan Plano dalam Keban (2008:4)** adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik. Selain itu, Keban juga menyatakan bahwa istilah Administrasi Publik menunjukkan bagaimana pemerintah berperan sebagai agen tunggal yang berkuasa atau sebagai regulator, yang aktif dan selalu berinisiatif dalam mengatur atau mengambil langkah dan prakarsa, yang menurut mereka penting atau baik untuk masyarakat karena diasumsikan bahwa masyarakat adalah pihak yang pasif, kurang mampu, dan harus tunduk dan menerima apa saja yang diatur pemerintah (Keban, 2008:4).

Menurut **Michael M. Harmon & Richard T. Mayer (2016)** adalah administrasi publik kami mengacu pada orang-orang yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaan pemerintah. Pada masa yang masih rapuh, mereka dikenal sebagai pegawai negeri. Orang-orang yang termasuk dalam kelompok ini adalah semua orang yang pekerjaannya mengurus negeri dan melaksanakan perintah-perintah sipil.

Teori Administrasi menjelaskan upaya-upaya untuk mendefinisikan fungsi universal yang dilakukan oleh pimpinan dan asas-asas yang menyusun praktik kepemimpinan yang baik. **Henry Fayol (1841-1925)** menggunakan pendekatan atas manajemen administrasi, yaitu suatu pendekatan dari pimpinan atas sampai pada tingkat pimpinan terbawah.

Menurut **Felix A. Nigro dan Lloyd G. Nigro dalam Sodikin (2015: 5)** lima definisi yang dikemukakan tentang pengertian administrasi publik, yaitu sebagai berikut:

- 1) *Public Administration is cooperative group effort in public setting* (Administrasi Publik adalah suatu kerja sama kelompok didalam lingkungan pemerintahan).
- 2) *Public Administration covers all three branches: Executive, legislative, and judikatif, and their interrelationship* (Administrasi Publik meliputi ketiga cabang pemerintahan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta hubungan antar mereka).
- 3) *Public Administration has an important role formulating of public policy and is this a part of the political process* (Administrasi Publik

mempunyai peranan penting dalam perumusan kebijakan negara, dan karenanya merupakan bagian dari proses politik).

- 4) *Public Administration is closely associated with numerous private groups and individuals in providing service to the community* (Administrasi Publik sangat erat kaitannya dengan berbagai macam kelompok swasta dan individu dalam menyajikan pelayanan kepada masyarakat).
- 5) *Public Administration is different in significant ways from private administration* (Administrasi Publik di dalam beberapa hal berbeda pada penempatan pengertiannya dengan administrasi swasta).

Administrasi publik pada dasarnya membahas tentang keputusan-keputusan yang mempengaruhi kehidupan rakyat, mengatasnamakan publik, dan menggunakan sumber daya publik. Oleh karena itu, orang-orang yang bekerja dalam administrasi publik bukan hanya kelompok pegawai negeri saja. Pada tiap tingkatan pemerintah kini ada organisasi-organisasi agensi publik komisi, dan korporasi publik, yang kerja demi kepentingan publik.

Menurut **Gordon** yang dikutip **Syafie dalam buku Ilmu Administrasi Publik (2006: 25)**, yaitu : “Administrasi Publik dapat dirumuskan sebagai seluruh proses baik dilakukan organisasi maupun perorangan yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hukum serta peraturan yang dikeluarkan oleh badan legislatif, eksekutif, dan pengadilan”.

Dari pernyataan ahli diatas, peneliti menyimpulkan bahwa administrasi publik berkaitan dengan badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang berkenaan dengan formulasi dan implementasi kebijakan publik serta berkaitan dengan berbagai permasalahan manusiawi dan usaha untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.

Menurut **Dwight Waldo (2017)** mendefinisikan bahwa “Administrasi Publik adalah manajemen dan organisasi dari manusia-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintah”.

Menurut **Nicholas Henry (2017)** mendefinisikan bahwa :

“Administrasi Publik adalah suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosi pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efisiensi, efektivitas, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik”.

Dari beberapa definisi menurut ahli tersebut, maka peneliti menyimpulkan bahwa administrasi publik merupakan kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang atau lembaga dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintah dalam memenuhi kebutuhan publik secara efektif dan efisien.

Menurut **Gray (2017)** menjelaskan Peran Administrasi Publik dalam Masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dapat menjamin pemerataan distribusi pendapatan nasional kepada kelompok masyarakat miskin secara keadilan.

- 2) Melindungi hak-hak rakyat atas kepemilikan kekayaan, serta menjamin kebebasan bagi rakyat untuk melaksanakan tanggung jawab atas diri mereka sendiri dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan bagi kelompok masyarakat lanjut usia.
- 3) Melestarikan nilai tradisi masyarakat yang sangat bervariasi dari generasi ke generasi berikutnya, serta memberikan jaminan dan dukungan sumber-sumber sehingga nilai-nilai tersebut mampu tumbuh dan berkembang sesuai tuntunan perubahan zaman, serta dapat terus hidup bersama secara damai, serasi, dan selaras dengan budaya lain dilingkungannya.

Dengan begitu administrasi publik dapat dikatakan sebagai suatu proses yang terorganisir untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan tujuan yang diputuskan berdasarkan kepentingan publik dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik serta menyelesaikan permasalahan yang publik agar semua kebutuhan dan kepentingan ini dapat diselesaikan dengan baik dan maksimal.

2.1.3 Kajian Terhadap Middle Theory

2.1.3.1 Teori Organisasi

Organisasi dapat dikatakan sebagai alat untuk mencapai tujuan, oleh karena itu organisasi dapat dikatakan wadah kegiatan dari orang-orang yang bekerjasama dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Dalam kegiatan

tersebut orang-orang harus jelas tugas, wewenang dan tanggung jawabnya, hubungan dan tata kerjanya.

Pengertian konsep demikian disebut organisasi yang “statis”, karena sekedar hanya melihat dari strukturnya. Di samping itu terdapat pengertian organisasi yang bersifat “Dinamis”. Pengertian ini organisasi dilihat dari pada sudut dinamikanya, aktivitas atau tindakan dari pada tata hubungan yang terjadi di dalam organisasi itu, baik yang bersifat formal maupun informal. **Waldo** yang dikutip dalam **Silalahi (2013:124)** menyatakan : “Organisasi adalah struktur hubungan-hubungan di antara orang-orang berdasarkan wewenang dan bersifat tetap dalam suatu sistem administrasi.”

Selain itu, organisasi memiliki dua konsep yaitu konsep statis dan konsep dinamis. Konsep Statis organisasi merupakan sebuah struktur atau jaringan hubungan tertentu. Dalam artian, organisasi adalah sekelompok orang yang terikat bersama dalam hubungan formal untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan dalam Konsep Dinamis organisasi merupakan sebuah proses dari aktivitas yang sedang berlangsung. Dalam artian, organisasi adalah proses pengorganisasian, pekerjaan, orang dan sistem. Hal ini berkaitan dengan proses menentukan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan sebuah kelompok.

2.1.3.2 Ciri-ciri Organisasi

Pada dasarnya organisasi mempunyai tiga unsur dasar yang lebih terperinci. Menurut **Khaerul Umam** dalam bukunya yang berjudul

“Perilaku Organisasi” (2018;24) menyatakan bahwa ciri-ciri organisasi sebagai berikut :

- 1) Adanya suatu yang berbeda-beda, tetapi satu sama lain saling berkaitan yang merupakan kesatuan kegiatan.
- 2) Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal dan saling mengenal.
- 3) Tiap-tiap orang memberikan sumbangan atau kontribusinya berupa pemikiran, tenaga dan lain-lain.
- 4) Adanya tujuan yang ingin dicapai.

Bedasarkan ciri-ciri diatas dalam menapai tujuan bersama di dalam suatu organisasi harus saling bekerja satu sama lain dan saling percaya sehingga tujuan bersama bisa tercapai dan berjalan dengan baik.

Selain itu dengan adanya organisasi dan tujuannya, maka kita dapat mengetahui ciri-ciri organisasi tersebut. Beberapa ciri organisasi diantaranya adalah terdiri dari sekelompok orang yang terdiri dari dua orang atau lebih dan memiliki tujuan tentang alasan mengapa beberapa orang bekerjasama membentuk organisasi dengan harapan memiliki tujuan bersama yang ingin diwujudkan. Dengan adanya tujuan tersebut, para anggota organisasi akan saling bahu membahu dalam melakukan usaha untuk mencapai tujuan, saling bekerjasama untuk mencapai tujuan organisasi dengan para anggotanya sehingga perlu adanya kerjasama yang harus dilakukan. Tanpa adanya kerjasama antar anggota organisasi maka tujuan tidak dapat tercapai secara efektif dan efisien,

Pada umumnya setiap organisasi pasti memiliki peraturan masing-masing. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur dan membatasi sumber daya yang dimiliki agar saling bersinergi dalam proses pencapaian tujuan dan menciptakan manajemen yang baik dalam organisasi. Selain itu pembagian tugas dan tanggungjawab merupakan hal yang cukup penting pada setiap anggota organisasi. Pembagian tugas tersebut bisa dilakukan dengan pembentukan beberapa divisi atau tupoksi sesuai dengan apa yang dia emban.

2.1.4 Kajian Terhadap Operasional Theory

2.1.4.1 Pengertian Governance

Menurut **Rhoders**, pengertian *governance* yaitu : “*governance* memiliki definisi sebuah perubahan dari arti pemerintah menunjuk ke proses memerintah, perubahan tradisi dari aturan, serta metode yang mana masyarakat sudah diatur. Sedangkan menurut **Stoker**, *governance* itu menunjukkan pada pengembangan gaya menjalankan pemerintahan dalam mana antar sektor publik dan privat telah menjadi kabur. Esensi *governance* adalah pada fokusnya yaitu mekanisme penyelenggaraan pemerintah yang tidak lagi tergantung pada bantuan dan sanksi dari pemerintah.”

Menurut **Koolman** dan **Van Vilet (1993)**, “konsep *governance* lebih tertuju pada kreasi suatu struktur atau tertib yang tidak dapat diposisikan keluar tetapi merupakan hasil dari interaksi banyak pihak yang ikut terlibat

dalam proses pemerintahan dan mereka saling mempengaruhi satu sama lain.”

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *governance* adalah suatu rangkaian kegiatan atau proses interaksi sosial politik suatu pemerintahan dengan masyarakat di dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan juga intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut.

Ada 6 istilah dalam konsep *Governance* menurut **Rhodes (1996)**, yaitu :

1) *Governance as the Minimal State*

Ukuran, struktur dan peran pemerintah dirampingkan supaya proses penyelenggaraan pemerintah lebih efektif dan efisien dengan melakukan pengurangan beban anggaran, privatisasi dan memotong jumlah dinas sipil yang dirasa kurang berfungsi.

2) *Governance as Corporate Governance*

Proses penyelenggaraan kegiatan dengan mengambil over atau mengimitasi prinsip-prinsip yang ada di sektor privat, keterbukaan informasi, integritas individu, peran yang lebih jelas, dan akuntabilitas yang tinggi.

3) *Governance as The New Public Management*

Proses penyelenggaraan pemerintah yang lebih mengedepankan peran pemerintah sebagai layaknya peran manajer pada perusahaan atau bisnis.

4) *Governance as Good Governance*

Proses penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik, yaitu dalam arti berusaha mencapai kinerja dan juga sekaligus lebih *responsive, representatif* dan *responsible*.

5) *Governance as A Socio-Cybernetic System*

Proses penyelenggaraan pemerintah yang melibatkan interaksi dan interelasi banyak aktor atau pelaku baik dari birokrasi pemerintah maupun non-pemerintah (legislatif, swasta, LSM, akademi pers atau media) dan bertanggung jawab secara bersama.

6) *Governance as Self-Organizing Networks*

Proses penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan atas terbentuknya antar-organisasi dan antar-aktor yang kuat dimana semua pihak saling bertukar sumber-sumber baik dana, informasi, maupun keahlian serta akses dan aset lain untuk memaksimalkan kinerja pemerintah.

2.1.4.2 Pengertian Good Governance

Menurut **Mardiasmo (2018 : 23)** yang dikutip oleh *World Bank* mengungkapkan bahwa :

“*Good governance* adalah : “Suatu pelaksanaan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien”. Penghindaran salah dalam alokasi dan investasi, serta pencegahan korupsi secara politik dan administratif. Menjalankan disiplin anggaran untuk menciptakan *legal and political framework* bagi tumbuhnya suatu aktivitas-aktivitas dalam dunia usaha.”

Sedangkan menurut **Leny Nofianti (2015 : 52)** yang dikutip oleh **Soepomo (2000 : 143)** mengungkapkan bahwa *Good governance* adalah :

“Pemerintahan yang baik dalam melaksanakan tugas-tugas yang diembannya dan berakuntabel dengan terhadap publik secara profesional, transparan, bertanggung jawab dan adil. Untuk mewujudkannya jalan yang ditempuh seperti memberantas KKN dan memperbaiki kinerja pemerintah.”

Adapun dari beberapa definisi diatas **Rizal Djalil (2014 : 395)** juga menyatakan bahwa *good governance* diartikan sebagai berikut yaitu :

“Tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih pada suatu organisasi yang dituntut oleh rakyat untuk mendapatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip-prinsipnya serta dapat memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme”

Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *good governance* adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu pembangunan yang saling bekerjasama dan juga bertanggungjawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi serta tata kelola pemerintahan yang baik terkait dengan tugas yang telah di embannya.

Adapun teori yang menjadi rujukan dalam penelitian ini terkait dengan *good governance* menurut Menurut **Sedarmayanti (2014 : 5)** dengan beberapa indikator yang ada, diantaranya :

- 1) Partisipasi (*participation*) adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui Lembaga Perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya.

- 2) Transparansi (*transparency*) adalah harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan, informasi harus dapat di akses secara bebas oleh meraka yang membutuhkan dan informasi harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan alat monitoring dan evaluasi.
- 3) Akuntabilitas (*accountability*) adalah para pengambil keputusan dalam organisasi sektor pelayanan dan warga negara memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana halnya stakeholder pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda. Tergantung pada jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau eksternal.
- 4) Efektivitas (*effectiveness*) adalah proses dan lembaga yang menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia dengan sebaik mungkin.
- 5) Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum hak azasi manusia dan dalam bentuk merugikan Negara.

2.1.4.3 Implementasi Good Governance

Pada dasarnya *good governance* ini diterapkan Pemerintah untuk memperbaiki system penyelenggaran pelayanan publik khususnya di Kecamatan Talegong Kabupaten Garut terlebih dalam aspek manajemen pelayanan publik. Di dalam suatu pelayanan, tentu terdapat beberapa point penting yang harus ada didalam pelayanan publik diantaranya kecepatan,

ketepatan, kemudahan, dan keadilan. Dengan adanya aspek atau point-point tersebut, hal ini dapat menjadi alat untuk mengukur pelayanan publik yang berkualitas.

Seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini, tentu pelaksanaan *good governance* khususnya di Indonesia ini sudah mulai terlihat hasilnya. Dimana hal ini mulai muncul dengan adanya transparansi terkait dengan anggaran pendapatan serta belanja negara (APBN) serta adanya partisipasi dari masyarakat terkait dengan pengelolaan suatu anggaran pemerintahan baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Namun pada kenyataannya, tentu masih ada sejumlah kendala yang harus dihadapi dalam Pelaksanaan *Good Governance* di Kecamatan Talegong Kabupaten Garut. Dimana salah satunya kendala yang dihadapi yaitu terkait dengan sistem akuntansi dapat dikatakan belum begitu handal untuk pencatatan atau pelaporan intern, integritas dari para aparat pemerintahan. Selain itu, standar akuntansi memiliki juga memiliki peranan yang cukup penting dalam *good governance*. Sementara itu, terkait dengan kondisi politik dan ekonomi di Indonesia juga bisa jadi masalah yang menghambat pelaksanaan *good governance* yang terjadi saat ini khususnya di Kecamatan Talegong Kabupaten Garut. Maka oleh sebab itu, pelaksanaan *good governance* di kantor Kecamatan Talegong tentu harus dibarengi dengan Sumber daya Aparatur Sipil Negara yang kompeten. Hal ini tidak

lain bertujuan untuk memudahkan pelaksanaan *good governance* dalam pengimplementasiannya di kantor Kecamatan Talegong.

2.1.4.4 Pengembangan Aparatur Sipil Negara

Pengembangan Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Talegong Kabupaten Garut, disini peneliti memfokuskan penelitian terkait dengan pengembangan sumber daya Aparatur Sipil Negara. Pengembangan sumber daya manusia merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk manusia atau Aparatur Sipil Negara yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja dan loyalitas kerja kepada organisasi atau dalam hal ini yaitu organisasi atau instansi Kecamatan. Dimana dalam hal ini tidak sedikit suatu organisasi yang menolak calon pegawai karena tidak memenuhi kualifikasi yang dimaksud. Selain itu, banyak juga organisasi yang dibangun, namun terkadang sumber daya yang dimilikinya tidak tersedia atau kurang. Dalam era globalisasi ini, persaingan akan semakin ketat terlebih dalam kualitas SDM aparatur yang handal.

Di era globalisasi sekarang ini, globalisasi memberikan arus teknologi dan informasi serta mobilitas sumber daya manusia dari satu tempat ke tempat lain, yang dimana salah satu pengembangan sumber daya manusia yang harus dilakukan adalah melalui jenjang pendidikan.

Pada dasarnya, pendidikan merupakan aspek yang cukup penting dalam mengembangkan potensi sumber daya aparatur, karena pengetahuan sendiri akan diperoleh salah satunya dengan melalui pendidikan. Dalam hal

ini, seseorang yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dia cenderung tidak memiliki kemampuan dalam bekerja, yang dimana tentu suatu organisasi private atau organisasi publik seperti kecamatan misalnya, pada dasarnya mereka akan menyeleksi calon pegawai dilihat dari tingkat pendidikannya.

Di Indonesia sendiri, angka kemiskinan dapat kita lihat dilapangan masih terjadi cukup tinggi. Salah satu faktor yang menyebabkannya adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat yang menimbulkan kurangnya SDM yang unggul, sehingga tidak memiliki pekerjaan dan meningkatkan angka pengangguran. Oleh karena itu, disini pemerintah mempunyai peranan untuk mengupayakan adanya wajib belajar 9 tahun untuk membentuk SDM yang berkualitas di masa mendatang. Kemudian, masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah namun memiliki keterampilan, akan dikembangkan melalui UKM atau Usaha Kecil Menengah yang sekarang ini banyak dilakukan.

a. Strategi Pengembangan SDM

Strategi pengembangan SDM pada dasarnya tidak hanya melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan, namun ada banyak cara untuk mengembangkannya. Strategi pengembangan SDM menurut **Jons, 1928 dalam Sarwono, 1993**, antara lain :

1) Melalui pelatihan.

Pelatihan bertujuan untuk mengembangkan individu dalam bentuk peningkatan keterampilan, pengetahuan dan sikap.

2) Pendidikan

Pengembangan SDM melalui pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kerja, dalam arti pengembangan bersifat formal dan berkaitan dengan karir.

3) Pembinaan.

Pembinaan bertujuan untuk mengatur dan membina manusia sebagai sub sistem organisasi melalui program-program perencana dan penilaian, seperti *man power planning*, *performance appraisal*, *job analytic*, *job classification* dan lain-lain.

4) Recruitment.

Recruitment ini bertujuan untuk memperoleh SDM sesuai klasifikasi kebutuhan organisasi dan sebagai salah satu alat organisasi dalam pembaharuan dan pengembangan.

5) Melalui Perubahan sistem.

Perubahan sistem memiliki tujuan untuk menyesuaikan sistem dan prosedur organisasi sebagai jawaban untuk mengantisipasi ancaman dan peluang faktor eksternal.

2.2 Kerangka Berpikir

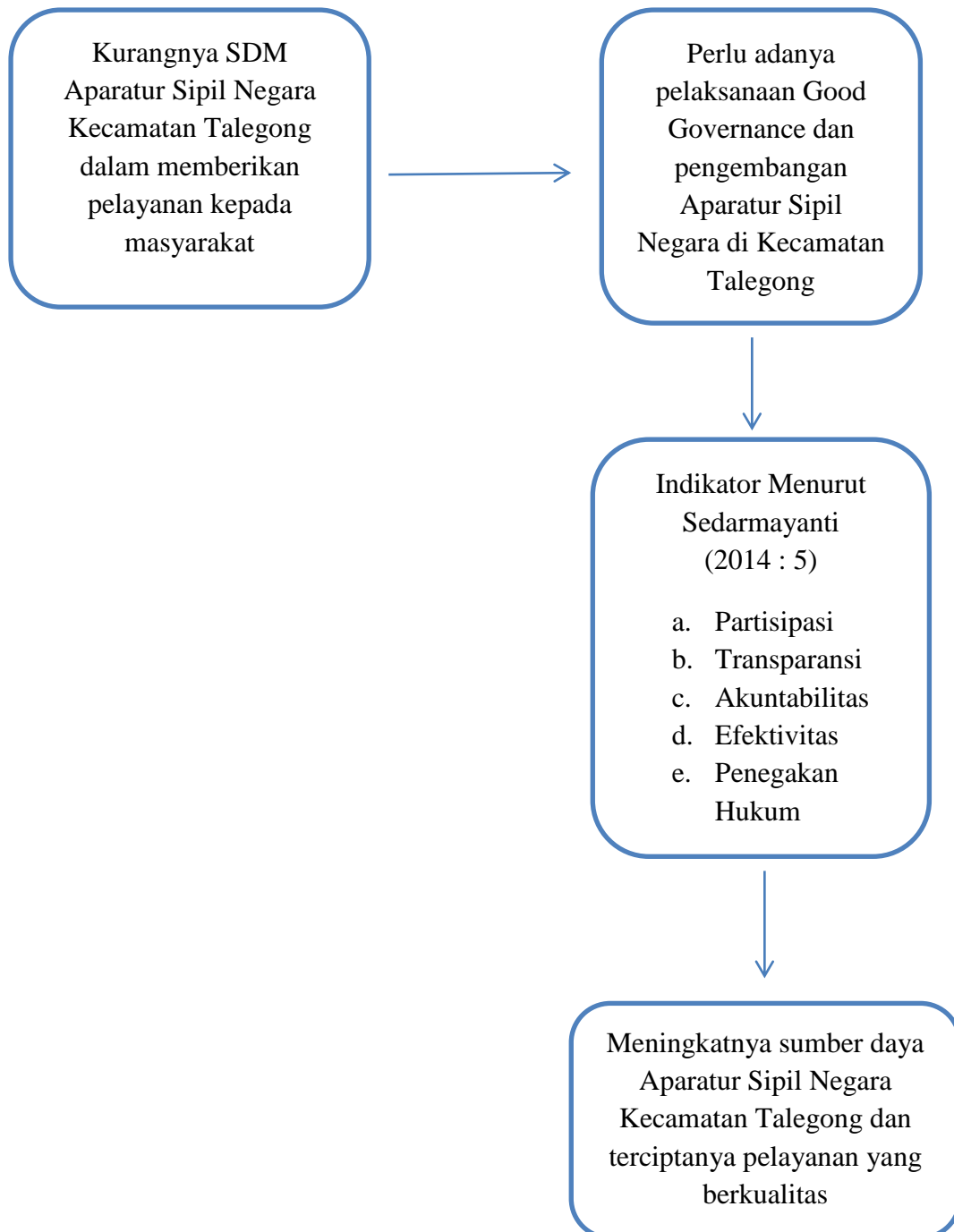
Pada kerangka pemikiran ini peneliti akan menjelaskan objek penelitian dan objek permasalahan mengenai Pelaksanaan *Good Governance* Dalam Pengembangan Aparatur Sipil Negara di Kecamatan

Talegong Kabupaten Garut yang pada dasarnya *good governance* ini merupakan suatu penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu pembangunan yang saling bekerjasama dan juga bertanggungjawab serta sejalan dengan prinsip demokrasi serta tata kelola pemerintahan yang baik terkait dengan tugas yang telah di embannya.

Dengan sejalannya perkembangan zaman, *good governance* ini di tuntutan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di Kecamatan Talegong terkait dengan Pengembangan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kecamatan Talegong. Menurut analisis awal peneliti bahwasanya pengembangan sumber daya Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Talegong dapat dikatakan belum optimal, hal ini terlihat dari kurangnya Diklat dan Pelatihan yang dilaksanakan oleh aparatur Pemerintah Kecamatan Talegong. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mendalami berbagai permasalahan yang ada pada kecamatan tersebut.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, peneliti melihat bahwa Pengembangan sumber daya Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Talegong harus lebih optimal dengan di laksanakan *good governance* di Kecamatan Talegong tersebut. Untuk mengukur Pelaksanaan *Good Governance* dalam Pengembangan Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Talegong Kabupaten Garut, pada penelitian ini teori yang di gunakan yaitu Menurut **Sedarmayanti (2014 : 5)** dengan beberapa indikator yang ada seperti : Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas, Efektivitas dan Penegakan Hukum.

Tabel 2.2
Kerangka Berpikir



2.3 Proposisi

Berdasarkan rumusan masalah, peneliti memfokuskan pada Pelaksanaan *Good Governance* dalam Pengembangan Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Talegong Kabupaten Garut sebagai berikut :

- 1) Pelaksanaan *good governance* dalam pengembangan Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Talegong Kabupaten Garut .
- 2) Hambatan yang dihadapi dalam pengembangan Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Talegong Kabupaten Garut.